



Analisis Statistik Presepsi Mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2023 Paralel C UPN “Veteran” Jawa Timur Sebagai Kampus Bela Negara Terhadap Efektifitas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Maulana Azis Alfahrezi ¹, Muhamad Abiedama Fahrezi ²,
Neo Harlan ³, Ahmad Rifaldi Prasetya ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik dan Sains,
UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Email: 23031010106@student.upnjatim.ac.id 23031010121@student.upnjatim.ac.id
23031010126@student.upnjatim.ac.id 23031010130@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *The Draft Asset Forfeiture Law represents a significant step in combating economic crimes in Indonesia, focusing on non-conviction-based asset recovery. This study aims to analyze the perceptions of Chemical Engineering students (2023 Cohort, Parallel C) at UPN "Veteran" East Java, a designated State Defense Campus, regarding the law's effectiveness. Employing a quantitative approach, data were gathered using a validated Likert-scale questionnaire assessing understanding, potential impacts, and alignment with state defense principles. The findings reveal that the majority of students perceive the draft law as a strategic tool for strengthening justice, reducing corruption, safeguarding public interests, and enhancing governmental integrity. However, some respondents expressed concerns over potential conflicts with human rights and implementation inefficiencies. This research underscores the necessity of harmonizing legislative frameworks with human rights and public trust, emphasizing the role of state defense education in fostering policy support..*

Keywords: *Asset Forfeiture Law, Corruption Prevention, Human Rights Compliance, Policy Implementation Efficiency, Higher Education Perception*

Abstrak. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memberantas tindak pidana ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada pemulihan aset berbasis non-conviction. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Teknik Kimia (Angkatan 2023, Paralel C) di UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai Kampus Bela Negara terhadap efektivitas rancangan undang-undang tersebut. Dengan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert yang telah divalidasi untuk menilai pemahaman, dampak potensial, dan kesesuaian dengan prinsip bela negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memandang rancangan ini sebagai alat strategis untuk memperkuat keadilan, mengurangi korupsi, melindungi kepentingan publik, dan meningkatkan integritas pemerintah. Namun, beberapa responden mengkhawatirkan potensi konflik dengan hak asasi manusia dan efisiensi implementasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi kerangka legislasi dengan hak asasi manusia dan kepercayaan publik, serta peran pendidikan bela negara dalam mendukung kebijakan..

Kata kunci: Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Pencegahan Korupsi, Kepatuhan Hak Asasi Manusia, Efisiensi Implementasi Kebijakan, Persepsi Pendidikan Tinggi.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan kasus korupsi yang cukup tinggi hingga saat ini. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan dengan berbagai cara, seperti memperberat sanksi terhadap pelaku korupsi. Akan tetapi, korupsi masih marak terjadi (Napisa & Yustio, 2021). Berdasarkan data Trading Economics pada tahun 2023, Indonesia saat ini berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi

dengan skor 34 dari 100 (Economics, 2023). Hal ini mencerminkan stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Masalah ini salah satunya disebabkan oleh penegak hukum dan kebijakan tentang yang kurang mendukung. Selain itu, korupsi juga dipengaruhi oleh peraturan yang sudah tidak relevan karena masih berfokus pada pembalasan fisik. Upaya pemerintah dalam menekan kasus korupsi di Indonesia adalah dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Najib, 2023). RUU ini dinilai sebagai langkah strategis untuk pemulihan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, sekaligus upaya pencegahan tindak pidana ekonomi (Yunus & Nasution, 2022).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah positif dalam memerangi tindak pidana ekonomi di Indonesia melalui pendekatan *in rem* atau *non-conviction based (NCB) asset forfeiture*. Akan tetapi, hal ini perlu perhatian khusus terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan optimalisasi efisiensi penelusuran aset (La Ode & Yulestari, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis persepsi mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2023 Paralel C UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai Kampus Bela Negara terhadap efektivitas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini telah menjadi praktik umum di berbagai negara Asia sebagai solusi untuk pemulihan aset dalam kasus tindak pidana ekonomi (Tardi, 2023). Penelitian ini menekankan pentingnya perbandingan dengan implementasi serupa di negara berkembang untuk memahami tantangan dan peluang penerapannya (Tardi, 2023).

Populasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2023 Paralel C di UPN "Veteran" Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling, mengingat jumlah populasi yang terjangkau. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert 5 poin, dengan rentang 1 hingga 5 (1 untuk setuju dan 5 untuk tidak setuju). Kuesioner ini dirancang untuk mengevaluasi persepsi mahasiswa terhadap tiga aspek utama: tingkat pemahaman terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dampak potensial undang-undang tersebut, dan kesesuaian rancangan dengan nilai-nilai bela negara.

Proses pengumpulan data dilakukan secara daring melalui platform survei digital untuk memudahkan akses peserta, dilengkapi opsi pengisian secara luring bagi responden yang memerlukan bantuan teknis. Sebelum digunakan, kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan akurasi pengukuran. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memetakan persepsi umum mahasiswa dan statistik inferensial guna mengidentifikasi hubungan atau pola signifikan antar variabel. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai persepsi mahasiswa terhadap rancangan undang-undang dalam konteks kampus bela negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, mayoritas responden yang terdiri dari 44,7% laki-laki dan 55,3% perempuan menunjukkan pandangan positif terhadap rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dukungan paling kuat terlihat dalam aspek keadilan, pengurangan korupsi, relevansi dengan nilai bela negara, perlindungan kepentingan publik, dan kontribusinya terhadap citra pemerintah. Hal ini mencerminkan optimisme terhadap rancangan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperbaiki sistem hukum Indonesia, meskipun masih ada minoritas responden yang bersikap netral atau tidak setuju.

Sebagian besar responden menyatakan keyakinan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat membantu menegakkan keadilan di Indonesia. Sebanyak 63,2% setuju, diikuti oleh 21,1% yang cukup setuju. Hal ini menunjukkan pandangan bahwa rancangan ini mampu mendukung penegakan keadilan. Namun, terdapat sedikit responden yang bersikap netral (5,3%) atau tidak setuju, yakni 7,9% cukup tidak setuju dan 2,6% tidak setuju.

Sebanyak 36,8% responden setuju dan 47,4% cukup setuju bahwa rancangan ini dapat mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Dukungan ini menunjukkan keyakinan bahwa rancangan ini memiliki potensi untuk memberantas korupsi. Meskipun demikian, terdapat responden yang bersikap netral (5,3%) serta tidak setuju, dengan 7,9% cukup tidak setuju dan 2,6% tidak setuju.

Rancangan ini juga dinilai relevan dengan nilai-nilai bela negara yang diajarkan di universitas, dengan 47,4% responden setuju dan 28,9% cukup setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merasa rancangan ini sejalan dengan

pendidikan bela negara. Namun, ada 15,8% responden yang netral dan sebagian kecil yang tidak setuju, yaitu 2,6% cukup tidak setuju dan 5,3% tidak setuju.

Terkait potensi rancangan dalam melindungi kepentingan publik dari pihak yang menyalahgunakan kekuasaan, pendekatan ini terbukti efektif di berbagai negara berkembang. Studi dari UNDP (2022) menekankan bahwa pemulihan aset melalui mekanisme non-conviction based mampu memutus sumber daya ekonomi dari pelaku kejahatan. Namun, dalam konteks Indonesia, pendekatan ini memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Potensi konflik HAM harus diminimalkan melalui kebijakan yang transparan dan mekanisme pengawasan yang ketat (Wardhani & Prasetyo, 2021). Melalui laporan pengamatan, didapatkan data bahwa responden yang setuju dan cukup setuju masing-masing mencapai 39,5%. Dukungan ini mencerminkan keyakinan terhadap peran rancangan dalam menjaga kepentingan publik. Meski begitu, ada 13,2% responden yang netral serta sebagian kecil yang cukup tidak setuju (5,3%) dan tidak setuju (2,6%).

Sebanyak 50% responden setuju bahwa rancangan ini berpotensi memperbaiki citra pemerintah dalam penegakan hukum, diikuti oleh 31,6% yang cukup setuju. Optimisme ini menunjukkan harapan bahwa rancangan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, ada 13,2% yang netral serta 2,6% masing-masing cukup tidak setuju dan tidak setuju.

Rancangan ini juga dinilai cukup efektif dalam melawan tindakan kriminal ekonomi, dengan 47,4% responden setuju dan 34,2% cukup setuju. Meski demikian, terdapat responden yang netral (10,5%), cukup tidak setuju (2,6%), dan tidak setuju (5,3%), menunjukkan adanya keraguan dalam efektivitas spesifiknya.

Dukungan yang sangat kuat terlihat dalam pernyataan terkait penerapan rancangan ini sebagai bagian dari upaya bela negara. Sebanyak 68,4% responden setuju dan 21,1% cukup setuju, menunjukkan dukungan mahasiswa terhadap rancangan tersebut sebagai wujud nyata semangat bela negara. Hanya sedikit responden yang bersikap netral (2,6%) atau tidak setuju, masing-masing sebanyak 5,3% cukup tidak setuju dan 2,6% tidak setuju.

PENYAJIAN DATA

Tabel 1. Data Jenis Kelamin

No.	Data	No.	Data
1	1	20	2
2	1	21	2
3	1	22	2
4	1	23	2
5	1	24	2
6	1	25	2
7	1	26	2
8	1	27	2
9	1	28	2
10	1	29	2
11	1	30	2
12	1	31	2
13	1	32	2
14	1	33	2
15	1	34	2
16	1	35	2
17	1	36	2
18	2	37	2
19	2	38	2

Tabel 2. Pertanyaan No.1

No.	Data	No.	Data
1	1	20	1
2	1	21	1
3	1	22	1
4	1	23	1
5	1	24	1
6	1	25	2
7	1	26	2
8	1	27	2
9	1	28	2
10	1	29	2
11	1	30	2
12	1	31	2
13	1	32	2
14	1	33	3

15	1	34	3
16	1	35	4
17	1	36	4
18	1	37	4
19	1	38	5

Tabel 3. Pertanyaan No. 2

No.	Data	No.	Data
1	1	20	2
2	1	21	2
3	1	22	2
4	1	23	2
5	1	24	2
6	1	25	2
7	1	26	2
8	1	27	2
9	1	28	2
10	1	29	2
11	1	30	2
12	1	31	2
13	1	32	2
14	1	33	2
15	1	34	2
16	1	35	2
17	1	36	2
18	2	37	2
19	2	38	2

Tabel 4. Pertanyaan No.3

No.	Data	No.	Data
1	1	20	2
2	1	21	2
3	1	22	2
4	1	23	2
5	1	24	2
6	1	25	2
7	1	26	2
8	1	27	2
9	1	28	2
10	1	29	2

11	1	30	2
12	1	31	2
13	1	32	2
14	1	33	2
15	1	34	2
16	1	35	2
17	1	36	2
18	2	37	2
19	2	38	2

Tabel 5. Pertanyaan No. 4

No.	Data	No.	Data
1	1	20	2
2	1	21	2
3	1	22	2
4	1	23	2
5	1	24	2
6	1	25	2
7	1	26	2
8	1	27	2
9	1	28	2
10	1	29	2
11	1	30	2
12	1	31	2
13	1	32	2
14	1	33	2
15	1	34	2
16	1	35	2
17	1	36	2
18	2	37	2
19	2	38	2

Tabel 6. Pertanyaan No. 5

No.	Data	No.	Data
1	1	20	2
2	1	21	2
3	1	22	2
4	1	23	2
5	1	24	2
6	1	25	2

7	1	26	2
8	1	27	2
9	1	28	2
10	1	29	2
11	1	30	2
12	1	31	2
13	1	32	2
14	1	33	2
15	1	34	2
16	1	35	2
17	1	36	2
18	2	37	2
19	2	38	2

Tabel 7. Pertanyaan No. 6

No.	Data	No.	Data
1	1	20	2
2	1	21	2
3	1	22	2
4	1	23	2
5	1	24	2
6	1	25	2
7	1	26	2
8	1	27	2
9	1	28	2
10	1	29	2
11	1	30	2
12	1	31	2
13	1	32	2
14	1	33	2
15	1	34	2
16	1	35	2
17	1	36	2
18	2	37	2
19	2	38	2

Tabel 8. Pertanyaan No. 7

No.	Data	No.	Data
-----	------	-----	------

1	1	20	2
2	1	21	2
3	1	22	2
4	1	23	2
5	1	24	2
6	1	25	2
7	1	26	2
8	1	27	2
9	1	28	2
10	1	29	2
11	1	30	2
12	1	31	2
13	1	32	2
14	1	33	2
15	1	34	2
16	1	35	2
17	1	36	2
18	2	37	2
19	2	38	2

PENGOLAHAN DATA

		Jenis Kelamin Responden	Saya merasa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat membantu menegakkan keadilan di Indonesia.	Saya yakin rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat mengurangi praktik korupsi di Indonesia.	Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sejalan dengan nilai bela negara yang diajarkan di universitas.	Saya percaya bahwa Undang-Undang Perampasan Aset akan melindungi kepentingan publik dari pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.
N	Valid	38	38	38	38	38
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	1.55	1.66	1.92	1.89	1.92
	Median	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00
	Mode	2	1	2	1	1 ^a
	Std. Deviation	.504	1.072	.997	1.110	.997
	Variance	.254	1.150	.994	1.232	.994

		Undang-Undang Perampasan Aset berpotensi memperbaiki citra pemerintah dalam hal penegakan hukum.	Saya merasa bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah cukup efektif dalam merancang aturan-aturan untuk melawan tindakan kriminal ekonomi.	Sebagai mahasiswa, saya mendukung diterapkannya Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya bela negara.
N	Valid	38	38	38
	Missing	0	0	0
Mean		1.76	1.84	1.53
Median		1.50	2.00	1.00
Mode		1	1	1
Std. Deviation		.971	1.079	.979
Variance		.942	1.164	.959

Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	17	44.7	44.7	44.7
	Perempuan	21	55.3	55.3	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Saya merasa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat membantu menegakkan keadilan di Indonesia.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	24	63.2	63.2	63.2
	Cukup Setuju	8	21.1	21.1	84.2
	Netral	2	5.3	5.3	89.5
	Cukup Tidak Setuju	3	7.9	7.9	97.4
	Tidak Setuju	1	2.6	2.6	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Saya yakin rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat mengurangi praktik korupsi di Indonesia.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	14	36.8	36.8	36.8
	Cukup Setuju	18	47.4	47.4	84.2
	Netral	2	5.3	5.3	89.5
	Cukup Tidak Setuju	3	7.9	7.9	97.4
	Tidak Setuju	1	2.6	2.6	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sejalan dengan nilai-nilai bela negara yang diajarkan di universitas.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	18	47.4	47.4	47.4
	Cukup Setuju	11	28.9	28.9	76.3
	Netral	6	15.8	15.8	92.1
	Cukup Tidak Setuju	1	2.6	2.6	94.7
	Tidak Setuju	2	5.3	5.3	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Saya percaya bahwa Undang-Undang Perampasan Aset akan melindungi kepentingan publik dari pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	15	39.5	39.5	39.5
	Cukup Setuju	15	39.5	39.5	78.9
	Netral	5	13.2	13.2	92.1
	Cukup Tidak Setuju	2	5.3	5.3	97.4
	Tidak Setuju	1	2.6	2.6	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Undang-Undang Perampasan Aset berpotensi memperbaiki citra pemerintah dalam hal penegakan hukum.

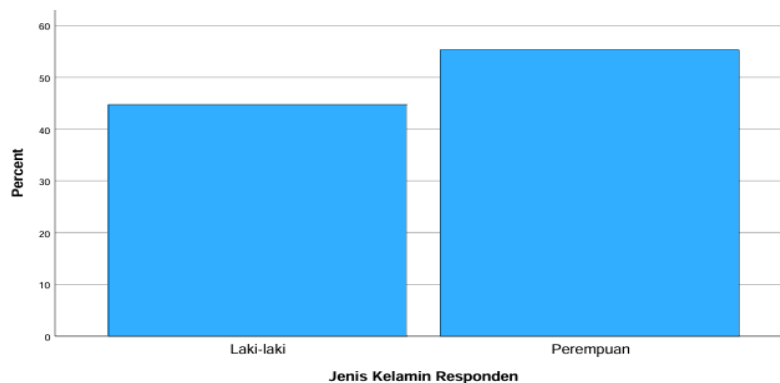
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	19	50.0	50.0	50.0
	Cukup Setuju	12	31.6	31.6	81.6
	Netral	5	13.2	13.2	94.7
	Cukup Tidak Setuju	1	2.6	2.6	97.4
	Tidak Setuju	1	2.6	2.6	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

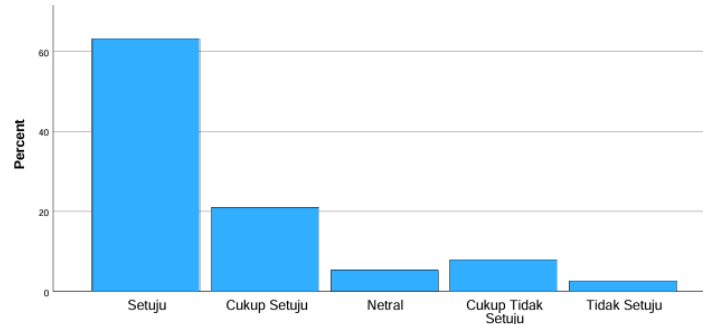
Saya merasa bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah cukup efektif dalam merancang aturan-aturan untuk melawan tindakan kriminal ekonomi.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	18	47.4	47.4	47.4
	Cukup Setuju	13	34.2	34.2	81.6
	Netral	4	10.5	10.5	92.1
	Cukup Tidak Setuju	1	2.6	2.6	94.7
	Tidak Setuju	2	5.3	5.3	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

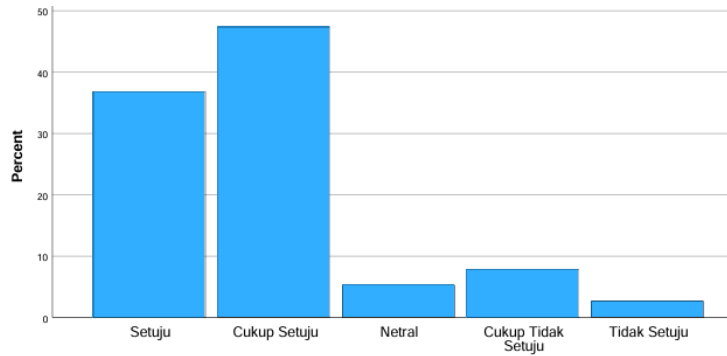
Sebagai mahasiswa, saya mendukung diterapkannya Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya bela negara.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	26	68.4	68.4	68.4
	Cukup Setuju	8	21.1	21.1	89.5
	Netral	1	2.6	2.6	92.1
	Cukup Tidak Setuju	2	5.3	5.3	97.4
	Tidak Setuju	1	2.6	2.6	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

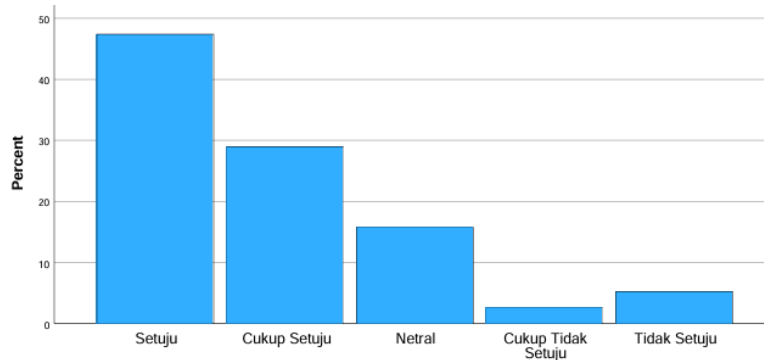




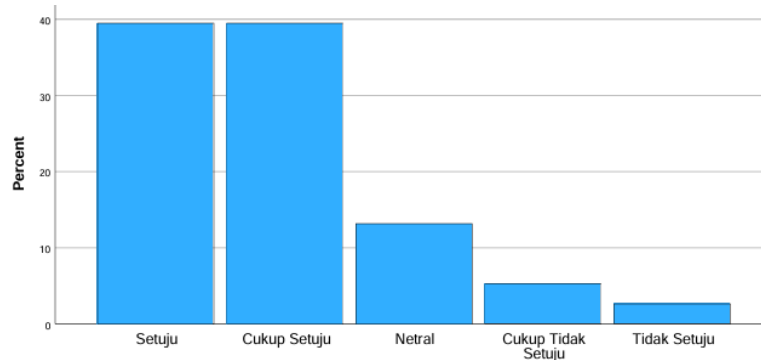
Saya merasa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat membantu menegakkan keadilan di Indonesia.



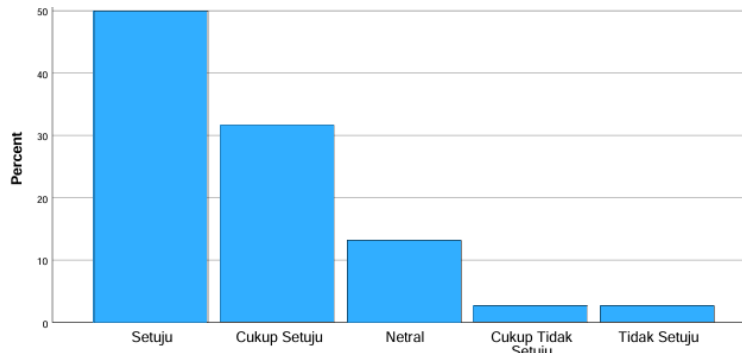
Saya yakin rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat mengurangi praktik korupsi di Indonesia.



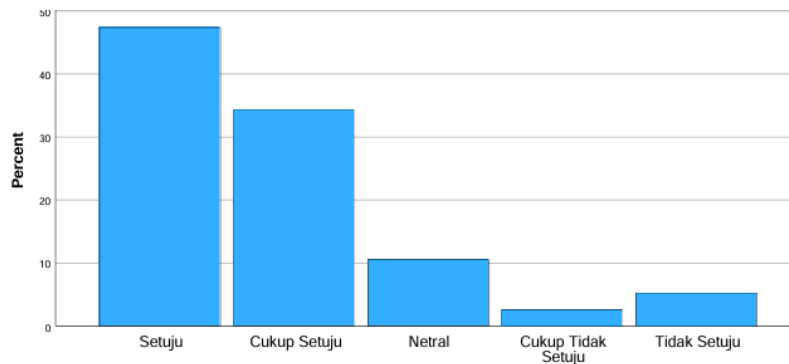
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sejalan dengan nilai-nilai bela negara yang diajarkan di universitas.



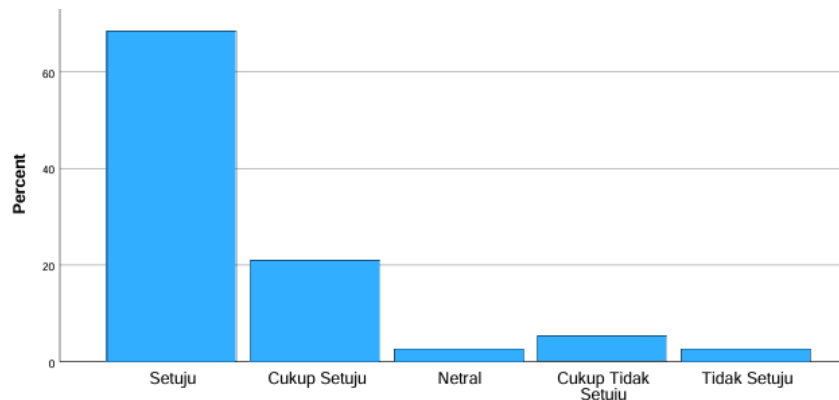
Saya percaya bahwa Undang-Undang Perampasan Aset akan melindungi kepentingan publik dari pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.



Undang-Undang Perampasan Aset berpotensi memperbaiki citra pemerintah dalam hal penegakan hukum.



Saya merasa bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah cukup efektif dalam merancang aturan-aturan untuk melawan tindakan kriminal ekonomi.



Sebagai mahasiswa, saya mendukung diterapkannya Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya bela negara.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2023 Paralel C UPN "Veteran" Jawa Timur terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagian besar positif. Mayoritas responden mendukung rancangan ini karena dianggap mampu menegakkan keadilan, mengurangi korupsi, melindungi kepentingan publik, dan memperbaiki citra pemerintah. Responden juga menilai rancangan ini relevan dengan nilai bela negara yang menjadi bagian dari pendidikan di universitas.

Namun, terdapat beberapa responden yang menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan terhadap rancangan tersebut. Kritik utama berkaitan dengan efisiensi implementasi dan koordinasi antarinstansi yang diperlukan dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Setiawan (2023), yang menemukan bahwa efektivitas RUU Perampasan Aset sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur hukum dan kerja sama lintas sektoral. Selain itu, kritik lainnya datang dari potensi konflik dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan efisiensi implementasinya. Hal ini menjadi catatan penting bahwa walaupun rancangan ini memiliki potensi besar dalam memberantas korupsi, tetap diperlukan pendekatan yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Dalam konteks pendidikan bela negara, mayoritas mahasiswa setuju bahwa RUU ini mencerminkan nilai-nilai bela negara, seperti integritas, keadilan, dan tanggung jawab publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan bela negara dapat menjadi platform yang efektif untuk meningkatkan dukungan terhadap kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mayoritas mahasiswa mendukung RUU Perampasan Aset sebagai langkah strategis memberantas korupsi dan memperkuat sistem hukum Indonesia, meskipun ada sebagian kecil yang ragu terkait perlindungan HAM dan efisiensi penerapan. Untuk mengatasi keraguan ini, pemerintah perlu meningkatkan pemahaman mahasiswa melalui kerja sama dengan institusi pendidikan serta melibatkan akademisi dan masyarakat sipil dalam menyempurnakan RUU agar kebijakan ini adil dan efisien. Institusi pendidikan juga diharapkan mengintegrasikan pembahasan RUU ini dalam pendidikan bela negara guna memperkuat pemahaman relevansi kebijakan. Pendidikan bela negara memainkan peran strategis dalam membangun kesadaran mahasiswa terhadap integritas, tanggung jawab publik, dan dukungan terhadap kebijakan antikorupsi. Rahmawati (2022) menekankan bahwa pendidikan bela negara di perguruan tinggi dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi dan kesadaran hukum pada generasi muda. Selain itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas RUU dalam pemberantasan korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan tetap sesuai dengan prinsip HAM.

5. DAFTAR REFERENSI

- Economics, T. (2023). Peringkat korupsi data indikator ekonomi.
- Kurniawan, B., & Setiawan, I. (2023). Efisiensi implementasi RUU perampasan aset dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 289–302.
- La Ode, Y., & Yulestari, R. R. (2024). Optimalisasi perlindungan hak asasi manusia pada rancangan undang-undang perampasan aset dalam penanganan tindak pidana ekonomi. *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 1–20.
- Najib, M. A. (2023). Polemik pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 159–175.
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi) kajian literatur manajemen pendidikan dan ilmu sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564–579.
- Rahmawati, S. (2022). Pendidikan bela negara dan implementasinya dalam kebijakan publik di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 4(2), 234–245.
- Tardi, R. (2023). Non-conviction based asset forfeiture: A comparative analysis in Asia. *International Journal of Law and Policy*, 9(1), 15–27.
- UNDP. (2022). *Tackling corruption: The role of asset forfeiture and recovery*. United Nations Development Programme.
- Wardhani, A., & Prasetyo, M. (2021). Analisis hukum HAM dalam implementasi kebijakan perampasan aset. *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 6(1), 112–125.
- Yunus, A. A., & Nasution, R. (2022). Strategi pemulihan aset dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 402–417.